

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA TERORISME YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM PRAJURIT TNI DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

ABSTRAK

Miyas*

Tindak pidana terorisme tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi juga melibatkan oknum TNI seperti kasus menjual amunisi kepada gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian tesis ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana, bagaimana penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan terorisme, bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana terorisme.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris yakni penelitian yang dilakukan dengan cara mengacu pada norma-norma hukum yaitu meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder dan penelitian lapangan. Data primer dan sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang merupakan *Lex specialis derogat legi generali*). Anggota militer yang telah menjual amunisi kepada kelompok teroris OPM apabila ditinjau dari KUHP dapat disimpulkan sebagai perbuatan oknum tentara dapat dikualifikasikan telah melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara sehingga oknum tentara ini dapat dijatuhi pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan terorisme adalah apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut, karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau yustisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer, melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian).

Hasil penelitian yaitu hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana terorisme yaitu kepolisian selalu kesulitan dalam pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan terorisme

Kata Kunci : Tindak Pidana, Terorisme, TNI

LAW ENFORCEMENT OF TERRORISM CRIMINAL ACTIONS PERFORMED BY AN TNI SERVANT IN PERSPECTIVE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

Miyas *

Criminal acts of terrorism do not only involve civil society but also involve members of the TNI, such as the case of selling ammunition to the Free Papua Movement (OPM). perspective of the criminal justice system, how is law enforcement against unscrupulous members of the TNI who commit terrorism, what are the obstacles to law enforcement against unscrupulous members of the TNI who commit acts of terrorism.

The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical and empirical juridical research, namely research conducted by referring to legal norms, namely examining library materials or secondary materials and field research. Primary and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials

*Legal arrangements for terrorism crimes committed by TNI soldiers in the perspective of the criminal justice system are regulated in Law Number 5 of 2018 Concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism which is a *Lex specialis derogat legi generali*). Military members who have sold ammunition to the OPM terrorist group when viewed from the Criminal Code can be concluded as acts of individual soldiers who can be qualified as having committed crimes against State security so that these individual soldiers can be sentenced according to Law Number 5 of 2018 Concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Law enforcement against unscrupulous members of the TNI who commit terrorism is when viewed from a justisiable point of view, in this case the military (and the equivalent) then the Military Criminal Law is one of the criminal laws that specifically applies to the military (and is the equivalent) in addition to the enactment of the criminal law other (general and special in the meaning of the first division, because what applies to a military person (or just military justice) is not only military criminal law, but also general criminal law and provisions in general criminal law (which are basically also used by criminal law military with a few exceptions).*

The results of the study are obstacles to law enforcement against unscrupulous members of the TNI who commit acts of terrorism, namely the police always have difficulty finding initial evidence, examination of perpetrators who feel they are in the right position, perpetrators are suspected of having psychiatric disorders, low education of perpetrators, and attitudes of perpetrators criminal acts of terrorism who insist not to commit acts of terrorism

Keywords: Crime, Terrorism, TNI